

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Dadan Setia Nugraha*, Alan Setiawan, Destrya Prematuri Agningsih, Dwi Nurul
Aprilianti, Endas Sutisna, Lutfi Yuliani

Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April

*Corresponding Email: dadan.setianugraha@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Disaster Emergency Management Operations on Work Effectiveness in the Head of Emergency and Logistics Section at the Regional Disaster Management Agency of Sumedang Regency. The research method used in this research is quantitative research method with two data collection methods, namely literature study and field study which includes observation, questionnaires, interviews and documentation. The distribution of questionnaires was carried out to all ASN (State Civil Apparatus) and Non-ASN (Pusdalops) employees in the Regional Disaster Management Agency of Sumedang Regency, totaling 40 people. Based on the results of the study, it is known that the Operational Planning for Disaster Emergency Management at the Section Head for Emergency and Logistics at the Regional Disaster Management Agency of Sumedang Regency is 88.4%. Furthermore, the work effectiveness of the Head of Emergency and Logistics Section in the Regional Disaster Management Agency of Sumedang Regency is 90.5%. Based on the correlation test, it is known that there is a very strong relationship between the Operational Planning for Disaster Emergency Management with the Work Effectiveness of the Head of Emergency and Logistics Section in the Regional Disaster Management Agency of Sumedang Regency with a correlation coefficient of 0.808. The Effect of Disaster Emergency Management Operations Planning on Work Effectiveness in the Section Head for Emergency and Logistics in the Regional Disaster Management Agency of Sumedang Regency based on the determination test is in the strong category with a determination coefficient of 0.653 or if a percentage is 65.3%. While the remaining 34.7% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: Disaster Emergency Management Operations Planning, Work Effectiveness

PENDAHULUAN

Kabupaten Sumedang memiliki potensi bencana urutan ke-14 di provinsi Jawa Barat. Hal itu disebabkan karena Kabupaten Sumedang memiliki 162 titik rawan bencana dan memiliki status resiko tinggi dengan kategori tipe A. Berdasarkan hal tersebut pihak BPBD Kabupaten Sumedang membuat program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang bertujuan untuk mengurangi indeks resiko bencana, salah satu dari

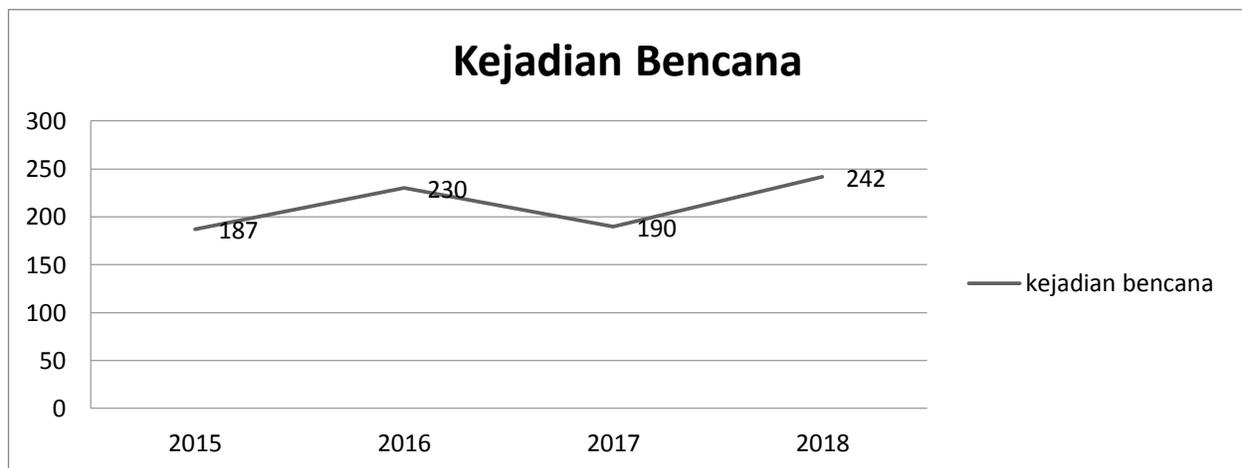
program tersebut yaitu mitigasi bencana.

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana yang terdapat pada UU Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat (9) yang mengatur tentang mitigasi bencana. Potensi bencana alam yang sering

terjadi di daerah Kabupaten Sumedang yaitu gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, pergerakan tanah, rumah roboh, angin puting beliung dan pohon tumbang. Dengan demikian banyaknya jumlah kejadian bencana alam tersebut menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar terhadap manusia dan aset penghidupannya. Hal ini memberi pelajaran untuk merubah pola pikir masyarakat akan arti pentingnya menanggulangi bencana sebelum bencana itu terjadi atau yang saat ini disebut dengan pengurangan resiko bencana, berbagai upaya yang dilakukan untuk pengurangan resiko bencana terus berlangsung dan berubah menuju arah yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

Mitigasi pada umumnya dilakukan dalam rangka mengurangi

kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana, baik itu korban jiwa atau kerugian harta benda yang berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Untuk mendefinisikan rencana atau strategi mitigasi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan kajian resiko (*risk assessmemnt*). Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan yang rutin dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini berarti bahwa kegiatan dalam mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode sebelum kegiatan bencana, yang seringkali datang lebih cepat dari waktu yang diperkirakan dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.



Gambar 1. Kejadian Bencana di Kabupaten Sumedang Periode 2015-2018

Dari grafik diatas kejadian bencana alam di Kabupaten Sumedangbaik itu tanah longsor, banjir, kebakaran, pergerakan tanah, rumah roboh, angin puting beliung dan pohon tumbang, dari tahun 2015 sampai tahun 2018

mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut terlihat dari peta wilayah rawan bencana terdapat 26 Kecamatan dengan tingkat kerawanan menengah hingga tinggi.

Dengan kondisi wilayah Kabupaten Sumedang yang rawan akan bencana alam maka BPBD terus berupaya untuk melakukan mitigasi bencana. Selain itu edukasi dan simulasi terhadap bencanapun terus dilakukan BPBD kepada warga Kabupaten Sumedang. Namun dalam pelaksanaan mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sumedang itu sendiri belum sepenuhnya dapat terealisasi kepada masyarakat secara optimal.

Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa fenomena masalah yang berkaitan dengan permasalahan mitigasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Komunikasi mengenai kebencanaan yang dilakukan pihak BPBD kepada Masyarakat, Hal ini dilihat dari peta wilayah rawan Bencana terdapat 26 Kecamatan dengan tingkat kerawanan menengah hingga tinggi, sedangkan dari pihak BPBD baru melakukan Sosialisasi ke 8 Kecamatan.
2. Masih rendahnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Hal ini diketahui dari hasil observasi ketika peneliti menanyakan mengenai pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana akan dilakukan ketika anggaran dari pemerintah sudah tersedia,serta program pembentukan Desa tangguh bencanasampai hari ini belum dapat terealisasi karena anggarannya belum memadai.
3. Kurangnya kuantitas pegawai di BPBD Kabupaten Sumedang. Hal ini diketahui dari hasil observasi ketika peneliti menanyakan tentang kuantitas pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan karena di BPBD sendiri statusnya masih tipe B belum tipe A yang otomatis kepegawaiannya atau kuantitasnya masih sangat kurang.
4. Ketepatan waktu pegawai dalam melaksanakan tugas masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat pegawai non PNS datang ke kantor tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang?

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2012: 148) menyatakan bahwa "implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*)".

Selanjutnya, menurut Grindle (Winarno, 2012: 149) mengemukakan bahwa "implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah".

yang dikembangkan oleh Edward III (Nugroho, 2008: 636) mengatakan bahwa masalah utama Administrasi Publik adalah *lack of attention to implementation*. dikatakan nya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu sebagai berikut:

1. *Communication* (komunikasi)
2. *Resource* (sumber daya)
3. *Disposition or attitude* (disposisi)
4. *Bureaucratic structures* (struktur birokrasi)

Suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda dilapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Menurut Sunggono (Andita, 2016: 41) dalam buku *hukum dan kebijakan publik*, implementasi kebijakan mempunyai faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian potensi

Mitigasi Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Untuk mengurangi dampak resiko kejadian bencana maka perlu adanya tindakan mitigasi bencana.

Menurut King, mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kemudian menurut Coppola mitigasi dapat dilihat sebagai upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana melalui

pengurangan kemungkinan dan komponen konsekuensi resiko bencana.

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mitigasi bencana merupakan tindakan yang di ambil sebelum bencana terjadi untuk mengurangi resiko atau dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ada dua jenis mitigasi yaitu sebagai berikut:

1. Struktural

Mitigasi struktural didefinisikan sebagai usaha mengurangi resiko yang dilakukan melalui pembanguana atau perubahan lingkungan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang. Ini juga mengacu pada pemikiran bahwa manusia mengendalikan alam yang diterapkan pada bencana alam. Upaya ini mencakup ketahanan konstruksi, langkah-langkah pengaturan, kode bangunan, relokasi, modifikasi struktur, dan pembangunan infrstruktur.

2. Non Struktural

Mitigasi nonstruktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi resiko melalui peningkatan kapasitas masyarakat, modifikasi prilaku manusia, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Teknik ini dianggap sebagai cara manusia menyesuaikan diri dengan alam. Didalam teknik ini terdapat langkah regulasi, program pendidikan, dan kesadaran masyarakat, modifikasi fisik nonstruktural, modifikasi prilaku, serta pengendalian lingkungan.

Peranan kelembagaan dalam mitigasi bencana memiliki nilai strategis untuk mewujudkan mekanisme mitigasi bencana yang terstruktur dan terpadu.

Mitigasi Bencana adalah tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu berjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup kegiatan perencanaan oleh pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko terkait dengan bahaya bencana-bencana yang sudah diketahui dan proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana-bencana yang benar-benar terjadi.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang berjumlah 51 orang, yang menjadi informan penelitian ini adalah KepalaPelaksana, Kasi Penanggulangan dan Kesiapsiagaan, Kasi Kedaruratan dan Logistik, Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi, dan Anggota Pusdalops pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang yang berjumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	1
2	Kasi Penanggulangan dan Kesiap-siagaan	1
3	Kasi kedaruratan dan Logistik	1
4	Kasi Rehabilitas dan Rekontruksi	1
5	Anggota Pusdalops	1
Jumlah		5

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara: (1) Studi Kepustakaan; dan (2) Studi Lapangan (Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi). Untuk mengolah data dari hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis dan Model Mailes dan Huberman (Sugiono, 2013: 246). Adapun prosedur pengolahan data hasil penelitian sesuai dengan teknik analisis data Model Mailes dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Data *reduction* (reduksi data)
2. Data *display* (penyajian data)
3. *Conclution drawing verification* (Pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

Untuk menjawab permasalahan ini peneliti melakukan wawancara dengan mengacu kepada teori model

implementasi kebijakan dari Edward III (Nugroho, 2008: 636) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa dimensi yang menentukan berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan dalam sebuah program, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Maka dari itu, ada 3 indikator yang menjadi fokus penelitian dari dimensi standar dan sasaran kebijakan ini yaitu kejelasan informasi, media, sarana penyampaian informasi, dan konsistensi dalam memberikan perintah. Adapun hasil penelitian yang diperoleh untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

- a) Pada indikator kejelasan informasi diketahui bahwa sosialisasi tentang mitigasi bencana memang

sudah dilakukan namun belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terbukti dari jumlah kecamatan yang sudah dilakukan sosialisasi tentang kebencanaan hanya baru 8 kecamatan yang telah dilakukan sosialisasi dari 26 kecamatan yang berpotensi rawan bencana;

- b) Pada indikator media diketahui bahwa media dari mitigasi bencana yaitu: media sosial seperti facebook, instagram dan relawan-relawan yang telah diberikan keterampilan khusus. Namun dalam website resmi BPBD masih belum ada yang memegang dan mengelolanya sehingga masyarakat sulit untuk mengakses mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
- c) Pada indikator Sarana Penyampaian Informasi diketahui bahwa sarana penyampaian informasi dari mitigasi bencana selain sosialisasi yaitu pihak BPBD melakukan semacam pencegahan bencana berupa kegiatan reboisasi atau penanaman sejuta pohon; dan
- d) Pada indikator konsistensi diketahui bahwa konsistensi dari mitigasi bencana sudah cukup jelas hal tersebut terbukti didalam RENJA BPBD Kabupaten Sumedang baik itu program kerjanya ataupun anggaran biayanya namun konsistensi tersebut terkadang selalu berubah karena kadang

ada beberapa hal yang selalu terjadi diluar perencanaan.

2. Sumber Daya

Kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah. Indikator dari sumber daya terdiri dari kompetensi implementor, sumber daya finansial, dan kuantitas pegawai. Adapun hasil penelitian dari masing-masing indikator sebagai berikut:

- a) Pada indikator kompetensi implementor diketahui bahwa kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai sudah cukup baik dalam menjalankan kebijakan mitigasi bencana. Hal tersebut dikarenakan para pegawai sudah dibekali dengan keahlian keahlian khusus dan juga para pegawai selalu diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan.;
- b) Pada indikator sumber daya finansial diketahui bahwa sumber daya financial atau anggaran sudah ada dan sudah terprogram namun terkadang sukamuncul program atau kejadian diluar rencana yang membutuhkan anggaran yang cukup besar; dan

- c) Pada indikator kuantitas pegawai diketahui bahwa kuantitas pegawai masih sangat kurang dan belum sesuai dengan kebutuhan karena sumedang sudah mempunyai predikat rawan bencana tipe A sedangkan BPBD dikabupaten Sumedang sendiri Masih di tipe B untuk jumlah pegwainya.
3. Disposisi
- Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* Kebijakan Publik tersebut kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi sering di artikan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh Implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila Implementor memiliki Disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi Disposisi yaitu kesamaan komitmen, tanggung jawab, ketulusan, dan ketepatan waktu. Adapun hasil penelitian dari masing-masing indikator sebagai berikut:
- a) Pada indikator Memiliki Kesamaan komitmen diketahui bahwa Kesamaan komitmen di BPBD Sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, karena dalam pelaksanaan mitigasi bencana sangat berfungsi untuk dapat mengurangi korban jiwa dari setiap kejadian. Dan juga
- dari pihak BPBD harus siap siaga hadir ditengah masyarakat ketika terjadi bencana dan segala bentuk bantuan dari pihak manapun akan datang ke BPBD langsung.
- b) Pada indikator tanggung jawab pegawai diketahui bahwa tanggung jawab pegawai di BPBD Sudah bertanggung jawab terhadap tufoksinya karena itu sudah menjadi kewajiban masing-masing. Akan tetapi Walaupun terjadi tumpang tindih pekerjaan namun para pegawai masih bisa menyelesaikan tugasnya dengan begitu baik.
- c) Pada indikator ketulusan pegawai diketahui bahwa ketulusan pegawai di BPBD Sudah sudah memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi karena mereka adalah orang-orang yang mau berkorban materi, tenaga dan pikirannya untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
- d) Pada indikator ketepatan waktu pegawai diketahui bahwa Untuk ketepatan waktu pegawai ASN sudah cukup disiplin karena sudah diberlakukan sistem absensi menggunakan finger print namun pegawai non PNS masih belum di berlakukan sistem finger print, tapi untuk ketepatan waktu mengenai tugas mereka masih kurang karena ada berbagai kendala terutama masalah transportasi karena kondisi akses jalan ketika menuju ketempat kejadian masih sangat buruk atau kurang baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi Birokrasi yang menjadi penyelenggara Implementasi Kebijakan Publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses Implementasi menjadi jauh dari efektif. struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi Struktur Birokrasi yaitu Indikator dari struktur birokrasi terdiri dari standar operasional prosedur, fragmentasi, dan pengawasan. Adapun hasil penelitian dari masing-masing indikator sebagai berikut:

- a) Pada indikator ketulusan pegawai diketahui bahwa SOP yang digunakan dalam mitigasi bencana sudah jelas dan para pegawai BPBD sudah ditempatkan sesuai keahlian. Sedangkan Untuk SOP tentang mitigasi bencana itu disusun oleh kasi pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian ketika ada kejadian bencana maka kasi kedaruratan logistik yang akan turun;
- b) Pada indikator ketulusan pegawai diketahui bahwa dalam pembagian tugas dalam pelaksanaan mitigasi bencana di BPBD Sumedang sudah jelas sesuai dengan Tupoksi terutama dalam menangani mitigasi bencana harus disesuaikan

dengan keahlian di bidangnya masing-masing; dan

- c) Pada indikator pengawasan diketahui bahwa dalam pengawasan yang dilakukan atasan kepada para pegawainya dalam pelaksanaan mitigasi bencana di BPBD Sumedang sudah menonitor baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta melakukan arahan kepada pegawai serta pegawainya selalu memberikan laporan ketika telah selesai melakukan kegiatan.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.

Suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda dilapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Masih kurang ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan mitigasi bencana;
2. Masih kurangnya kecukupan waktu dalam melaksanakan mitigasi bencana;

3. Tidak adanya hambatan dikarenakan adanya respon yang baik dari semua pihak dalam pelaksanaan mitigasi bencana;
4. Adanya hambatan dalam segi fasilitas yang masih kurang memadai serta dana pemerintah yang belum optimal; dan
5. Adanya hambatan pembagian tugas yang dibebankan kepada pegawai yang belum sesuai dengan potensi kerja para pegawai.

Upaya-Upaya Yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan atau implementasinya di dukung oleh sarana-sarana yang memadai. Berkaitan dengan permasalahan atau hambatan dalam implementasi suatu kebijakan, dalam upaya mengatasi penulis menggunakan variabel yang sama seperti halnya variabel yang digunakan dalam faktor pengambat implementasi kebijakan. Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan mitigasi bencana adalah:

1. Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Seperti halnya disusun rencana penanggulangan bencana, pemetaan kawasan rawan bencana, dan pengurangan resiko bencana;
2. Meningkatkan kejelasan untuk mengupayakan rencana kebijakan dalam mitigasi bencana;

3. Lebih menyesuaikan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam penempatan pegawai dalam menangani mitigasi bencana; dan
4. Lebih penguapayakan penempatan kerja sesuai dengan kemampuan berdasarkan beban kerja yang di berikan sesuai dengan potensi kerja para pegawai.

PENUTUP Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang sudah dapat dikatakan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya sempurna. Sumberdaya yang dimiliki masih kurang memadai, diantaranya kurangnya pegawai, anggaran yang belum cukup memadai, begitupun dengan kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana), yang belum terpenuhi secara maksimal.

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang masih cukup rendah hal ini dilihat dari peta wilayah rawan bencana terdapat 26 Kecamatan dengan tingkat kerawanan menengah hingga tinggi, sedangkan dari pihak BPBD baru melaksanakan sosialisasi ke 8 Kecamatan. Serta masih rendahnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan mitigasi bencana seperti program pembentukan Desa tangguh bencana sampai hari ini belum dapat terealisasi, serta masih rendahnya kuantitas pegawai di BPBD Kabupaten

Sumedang untuk menangani masalah kebencanaan.

Saran

1. Agar lebih ditingkat lagi dalam melaksanakan program sosialisasi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Sebaiknya pendanaan atau anggaran dari pemerintah harus lebih diperhatikan untuk pelaksanaan mitigasi bencana, agar program dari BPBD dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
3. Lebih meningkatkan sumberdaya aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana, dan menyediakan fasilitas yang memadai dari segi tempat maupun letak lokasi yang menarik minat masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.
4. Bagi pegawai non PNS sebaiknya diberlakukannya pinger print agar datang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang diberlakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2016. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Jawa Timur: Intrans Publising.
- Gunawan, Andika. 2017. *Pengaruh Pengembangan Karir terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumedang*. Universitas Sebelas April Sumedang.

Anggara, sahya. 2018. *Ekologi Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: CAPS.

Nugroho, Riant. 2011. *Public policy*. Jakarta: PT. Gramedia.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Islamy, M. Irfan. 2013. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Andita, Wenny. 2016. *Implementasi Kebijakan Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumahsakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu timur*. Universitas Hasanudin.

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Kurniawan. 2017. *Hukum dan Kebijakan publik*. Setara Press

Sungiono. 2016. *Metode Penelitian Manejemen*. Bandung: Alfabeta.

Nurul, Adinda. 2017. *Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Banjir*. *Jurnal of pilitic and goverment studies* 6, 15(2), 261-270

Nisa, Nur Elsa. 2018. *Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung ditinjau dari Siyasa Dusturiyah*. Tesis. Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati (UIN).